

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Undang-Undang tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa secara mandiri. Untuk itu, setiap desa akan mendapatkan dana melalui Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat signifikan.

Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana kampung masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah masalah akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk dana kampung, karena berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari sumber daya publik.

Kampung mempunyai sumber pendapatan berupa: (1) Pendapatan Asli Kampung, (2) Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, (3) Bagian Dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Yang Diterima Oleh Kabupaten/Kota, (4) Alokasi Anggaran Dari APBN, (5) Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi Dan APBD Kabupaten/Kota, (6) Serta Hibah Dan Sumbangan Yang Tidak Mengikat Dari Pihak Ketiga.

Alokasi dana desa secara nasional terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, mulai dari tahun 2022 sebesar Rp. 68 triliun menjadi Rp. 70 triliun pada tahun 2023 dan di tahun 2024 sebesar Rp. 71 triliun. Salah satu arah kebijakan dana desa tahun 2024 yakni untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mendukung program pembangunan yang berkelanjutan. Dana desa diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi kasus stunting, dan mendukung sektor-sektor prioritas lainnya.

Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengatakan besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa dapat menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Masih rendahnya pemahaman terhadap pengelolaan dana desa memunculkan kerentanan dalam pengelolaan APBDes, khususnya anggaran yang bersumber dari dana desa. Potensi penyimpangan yang terjadi masih relatif tinggi. Bahkan stigma bahwa dana desa ialah dana Kepala Desa pun terjadi, sehingga berdampak pada kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Muncul berbagai kasus hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang telah diungkap oleh penegak hukum maupun dilaporkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia *Corruption Watch*, Desa menjadi sektor dengan jumlah kasus korupsi terbanyak sepanjang tahun 2022. Dari hasil pemantauan tersebut juga menunjukkan bahwa yang paling banyak

menjadi terdakwa korupsi adalah pegawai pemda, diikuti dengan swasta. Tetapi, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemda dan swasta tersebar pada beberapa sektor, berbeda dengan kepala dan perangkat desa yang seluruhnya terjerat korupsi karena penyalahgunaan APBDes, termasuk dana kampung Anandya & Kaban, (2023). Dilansir dalam *Tribun-Papua.com*, Jayapura, Mantan kepala Kampung Skanto merupakan terduga kasus korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2017 yang di tangkap pada tahun 2021 dengan total kerugian negara sebesar Rp 70 juta rupiah.

Untuk mencapai tingkat akuntabilitas dan transparansi yang diinginkan di instansi pemerintahan, penggunaan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang tak terhindarkan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengolahan data yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Agar pemanfaatan teknologi informasi dapat berhasil, dibutuhkan tingkat kompetensi yang tinggi dari sumber daya manusia serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, kesalahan dalam pengelolaan dana kampung dapat diminimalkan.

Bentuk pengaplikasian teknologi informasi yaitu dengan menggunakan perangkat komputer sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan desa. Penggunaan komputer dinilai mampu menggandakan kinerja manusia, serta dinilai mampu mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Oleh karena itu, dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, pelaporan dana kampung diharapkan dapat lebih efektif serta *output* laporan

keuangannya juga lebih handal jika dibandingkan dengan pelaporan secara manual Sarah et al., (2020).

Selain teknologi informasi, keterlibatan masyarakat juga penting dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Pengelolaan dana kampung memerlukan partisipasi masyarakat karena salah satu prioritas penggunaan dana kampung adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam berbagai kegiatan atau aktivitas desa, partisipasi menjadi suatu keharusan. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terwujud jika mereka turut serta secara aktif dalam kegiatan kampung Dewi & Gayatri, (2019).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut memperlihatkan kompetensi aparat kampung menjadi salah satu faktor krusial. Dengan adanya kompetensi yang memadai, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, akan membantu aparat kampung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan akuntabel. Namun, beberapa studi terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil mengenai pengaruh kompetensi aparat kampung terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Studi yang dilakukan oleh Adelia & Harahap, (2022) dan Sarah et al., (2020) menemukan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Ridwan et al., (2023) dan Kuncahyo & Dharmakarja, (2022) justru menemukan bahwa kompetensi aparat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Beberapa studi lain juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan teknologi informasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung, seperti studi yang dilakukan oleh Adelia & Harahap, (2022) dan Sarah et al., (2020). Namun, studi lain menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu tidak adanya pengaruh yang signifikan dari partisipasi masyarakat dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil studi yang dilakukan oleh Putri et al., (2022) dan Riyadi & Kurnadi, (2020).

Beberapa penelitian terdahulu tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap hasil yang diberikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan mengganti variabel komitmen organisasi menggunakan variabel partisipasi masyarakat dalam penelitian yang dilakukan Novanti & Rohman, (2021). Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, tetapi komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Meskipun komitmen organisasi juga penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung akuntabilitas, partisipasi masyarakat dianggap lebih penting karena memiliki dampak yang lebih langsung dan signifikan dalam meningkatkan transparansi, efektivitas, dan legitimasi dalam pengelolaan dana kampung didukung oleh studi yang dilakukan oleh Ilhami & Widhiastuti, (2022).

Alat analisis yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah Regresi Linear Berganda. Sedangkan penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) – *Partial Least Square* (PLS). Dalam penelitian yang melibatkan banyak indikator, model yang dihasilkan sering kali sangat rumit dengan banyak variabel laten dan indikator. WarpPLS mampu mengelola kompleksitas ini dengan baik, memastikan bahwa setiap indikator diperhitungkan secara akurat dalam analisis. Keunggulan lain WarpPLS adalah kemampuannya menghasilkan hasil yang andal meskipun ukuran sampel kecil. Dalam penelitian dengan banyak indikator, seringkali sulit mengumpulkan sampel besar. WarpPLS menggunakan pendekatan PLS-SEM yang tidak memerlukan distribusi normal dan tetap efektif dengan sampel kecil, sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan alat analisis ini. Lokasi penelitian sebelumnya di Kabupaten Jepara. Sedangkan pada penelitian ini lokasinya berada di Distrik Skanto.

Berdasarkan uraian diatas maka, peneliti tertarik meneliti tentang **“PENGARUH KOMPETENSI APARAT KAMPUNG, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA KAMPUNG (Studi Empiris di Distrik Skanto)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparat kampung berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Kampung di Distrik Skanto?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Kampung di Distrik Skanto?
3. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Kampung di Distrik Skanto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris kompetensi aparat kampung berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Kampung di Distrik Skanto.
2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Kampung di Distrik Skanto.
3. Untuk menganalisis mendapatkan bukti empiris partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Kampung di Distrik Skanto.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yakni :

1. Manfaat akademis, diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Distrik Skanto

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan dalam menciptakan peranan pemerintah untuk mengelola dan mendistribusikan dana kampung yang ada ke pos-pos yang telah dianggarkan.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk masyarakat kampung yang berada di Distrik Skanto agar lebih aktif mengambil peran dan terlibat dalam pengelolaan dana kampung.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pembuka yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Beberapa hal yang dijelaskan dalam bab ini meliputi ruang lingkup penelitian, prosedur penentuan sampel, jenis dan metode pengumpulan data, metode analisis data, serta operasional variabel penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian meliputi penyajian data dan analisis data yang diperoleh selama penelitian, dan juga interpretasi hasil analisis data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini mencakup berbagai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran atau rekomendasi yang sesuai dengan kesimpulan yang telah dipaparkan.